

PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA SIAP PAKAI (DSP) PASCA BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

Nindya Najma¹, H. Akhsanul Haq², Yan Noviar³

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan

Email korespondensi: ² nindyanajma14@gmail.com

ABSTRAK

Dana Siap Pakai (DSP) adalah salah satu fasilitas yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah. Pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan dana siap pakai (DSP) yang digunakan pada status keadaan darurat bencana, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan audit internal dalam mendorong penerapan asas transparansi pengelolaan dana siap pakai. Penelitian ini dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor dan wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Penanganan Darurat Covid-19 di wilayah Kota Bogor. Kuesioner disebar sebanyak 40, namun yang dapat digunakan untuk pengolahan data hanya sebanyak 25 karena adanya kriteria tertentu. Data diolah dengan menggunakan MS.Excel dan SPSS Versi 25, uji kualitas data diolah dengan uji validitas dan uji reliabilitas, uji hipotesis dengan uji t. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa audit internal berperan penting dalam mendorong penerapan transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor. Pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil bahwa audit internal tidak berperan dalam penerapan transparansi pengelolaan dana siap pakai (DSP).

Kata kunci : Audit Internal, Transparansi Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP)

ABSTRACT

The Ready-to-Use Fund (DSP) is one of the facilities that is always available and reserved by the government. The government is committed to allocating ready-to-use funds (DSP) used in disaster emergencies, as intended in Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. This study aims to analyze the role of internal audit in encouraging the application of the principle of transparency in the management of ready-to-use funds. This research was conducted at the Bogor City Regional Disaster Management Agency. Data collection was carried out using a questionnaire given to staff of the Bogor City Regional Disaster Management Agency (BPBD) and an interview with the Treasurer of Auxiliary Expenditures (BPP) for Covid-19 Emergency Management in the Bogor City area. Questionnaires were distributed as many as 40, but only 25 that could be used for data processing due to certain criteria. The data is processed using MS. Excel and SPSS Version 25, data quality tests are treated with validity tests and reliability tests, hypothesis tests with t tests. The results of data processing show that internal audits play an important role in encouraging the implementation of transparency in the management of Ready-to-Use Funds (DSP) at the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Bogor City. Partial testing with t test found that internal audits do not play a role in implementing transparency in the management of ready-to-use funds (DSP).

Keywords: Internal Audit, Transparency of Ready-to-Use Fund Management (DSP)

PENDAHULUAN

Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (natural disaster) maupun oleh ulah manusia (man-made disaster). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain bahaya alam (natural hazards) dan bahaya karena ulah manusia (man-made hazards) yang menurut United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR, 2009), dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (geological hazards), bahaya hidrometeorologi (hydrometeorological hazards), bahaya biologi (biological hazards), bahaya teknologi (technological hazards) dan penurunan kualitas lingkungan (environmental degradation) Kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang berisiko bencana Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa sampai Nusa Tenggara, Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold, 1986).

Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia termasuk dalam negara yang rawan akan bencana alam, dan guna mengantisipasi hal tersebut, maka dibentuklah lembaga pemerintahan nonkementrian yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bertugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Melihat Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang termasuk ke dalam kategori rawan bencana, makna pemerintah Indonesia, menyadari bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak akan bisa mengatasi permasalahan bencana tersebut tanpa diperkuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang fokus di daerah baik provinsi maupun. Dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang melaksanakan tugas dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh BNPB. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah melalui BNPB dan BPBD bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana pada status keadaan darurat bencana harus dilakukan secara cepat yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan tepat pula untuk mencegah atau mengurangi jatuhnya korban jiwa serta meluasnya dampak bencana. hal tersebut memerlukan fasilitas pendukung yang memadai, agar dapat mengurangi serta meminimalkan penderitaan korban bencana. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.6 A Tahun 2021, menyatakan bahwa dana siap pakai digunakan sesuai kebutuhan penanganan darurat pada status keadaan darurat bencana yang

dibagi dalam tiga jangka waktu, yaitu: Status siaga darurat bencana, Status tanggap darurat bencana, dan Status transisi darurat bencana ke pemulihan,

Dalam keadaan darurat, dana siap pakai (DSP) adalah salah satu fasilitas yang selalu tersedia dan dicadangkan pemerintah. Dana siap pakai (DSP) hendaknya digunakan secara efektif dan efisien. Untuk menghindari kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaannya, penggunaan dana siap pakai (DSP) harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi yang berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana. Di daerah tingkat II, salah satu badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sedangkan untuk mengawasi BPBD dalam mengelola dana penanggulangan bencana yang diberikan BNPB dalam bentuk hibah dana siap pakai (DSP), maka diperlukan adanya audit internal yang berperan memeriksa kegiatan akuntansi dan keuangan, dan juga dalam pelaksanaan program kegiatan lainnya di BPBD yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia No.02 tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai. Sehubungan dengan penggunaan dana tersebut, audit internal memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan dana sampai pada tahapan pertanggungjawaban keuangan yang difasilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sudah dilaksanakan dengan benar dan sesuai SOP sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan penggunaan dana menjadi akuntabel, dan tepat sasaran.

Memasuki akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan adanya pandemi Covid-19 yang merupakan bagian penyakit koronavirus. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal penetapan, yaitu Senin, 13 April 2020.

Guna menanggulangi bencana nasional tersebut, pemerintah melalui Keputusan Presiden No.9 tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden No.7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dimana dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) langsung merespon keputusan presiden tersebut dengan menetapkan status keadaan darurat bencana terhadap bencana wabah virus Corona dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia. Sesuai dengan keputusan tersebut, dinyatakan bahwa segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Dana Siap Pakai (DSP) yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam rangka membantu mengurangi penyebaran Pandemi Covid-19 yang terjadi dan mendorong setiap Pemda di Indonesia, Pemerintah Kota Bogor bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membangun rumah sakit lapangan (RSL) untuk pasien Covid-19.

Namun dalam pelaksanaannya, BPBD Kota Bogor belum menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada beberapa pihak. Seperti yang terjadi pada hari Senin, 19 April 2021, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Sakit Lapangan Kota Bogor, Ari Priyono memaparkan mengenai belum dibayarnya alat kesehatan (alkes) di RS darurat ke pihak penyedia barang. Ari memerinci, biaya yang harus dikeluarkan untuk melunasi semua pembayaran alkes tan dan obat-obatan di RS Lapangan Kota Bogor mencapai Rp 5,6 miliar. Dia menjelaskan, belum dibayarkannya alat kesehatan dan obat-obatan tersebut lantaran

pencairan uang dari pemerintah pusat belum terselesaikan semuanya. Dari Rp 14,6 miliar anggaran yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mendirikan RS Lapangan, jumlah dana yang sudah dicairkan baru sebesar Rp 9 miliar. Keterlambatan pencairan dana itu tidak ada kaitannya dengan proses pengadaan alkes di Kota Bogor. Kejadian itu tidak hanya terjadi di Kota Bogor, namun juga termasuk pada beberapa RS Lapangan yang pembangunannya menggunakan anggaran Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB). (Sumber data : republik.co.id)

Kajian Literatur & Pengembangan Hipotesis

Arief Tri Hardiyanto dan Amelia Megarachmawati (2016), menyatakan bahwa audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa audit internal sangatlah penting bagi organisasi dalam menjalankan tugasnya agar dapat berjalan dengan efektif.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia disusun untuk menjaga mutu hasil audit intern yang dilaksanakan oleh Auditor Intern Pemerintah. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh Auditor dan pimpinan APIP. Penyusunan Standar Audit dimaksudkan agar pelaksanaan audit intern berkualitas, sehingga siapapun auditor yang melaksanakan penugasan sesuai dengan Standar Audit yang bersangkutan.

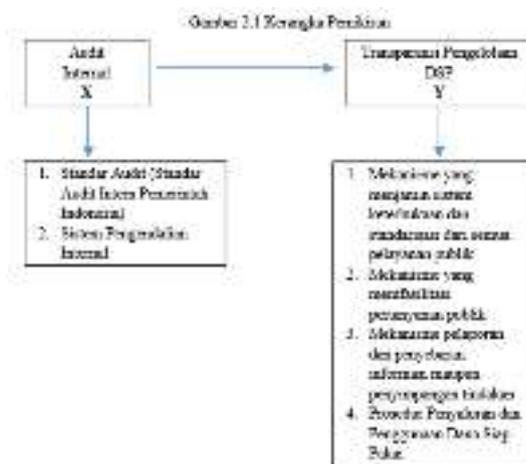
COSO2013 menyatakan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses di dalam organisasi yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya, dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada juga yang dimaksud dengan pengawasan internal yaitu Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD. Anggaran disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana. dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, pemerintah menyediakan bantuan hibah berupa dana kontinjensi bencana, dana siap pakai (DSP), dan dana bantuan sosial berpola hibah. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana. Dana siap pakai (DSP) adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.

Kerangka pemikiran



Pengembangan Hipotesis

Audit internal atas pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada masa transisi darurat ke pemulihan bencana alam yang terjadi di Kota Bogor bertujuan untuk:

- a) Mengetahui peranan audit internal dalam penerapan transparansi terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui BNPB yang berasal dari APBN maupun pemerintah daerah melalui BPBD yang berasal dari APBD, menilai proses penyaluran dana, ketepatan pemakaian dana dengan perencanaan dan keadaan di tempat terjadinya bencana.
- b) Mengidentifikasi apakah BPBD Kota Bogor sudah memenuhi asas akuntabilitas dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana yang tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, audit internal sangatlah berperan penting mengawasi dan menilai terhadap tata kelola BPBD dalam pelaksanaan pengelolaan dana penanggulangan bencana atas Dana Siap Pakai (DSP). Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H_0 : Audit internal memiliki peran penting dalam penerapan transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor.

H_a : Audit internal tidak memiliki peran penting dalam penerapan transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar dan kuantitatif yaitu data yang dalam penelitian dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka. Objek penelitian ini adalah variabel independen yang meliputi audit internal sebagai variabel X. Dengan variabel dependen yang meliputi transparansi pengelolaan dana sebagai variabel Y.

Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan seberapa baik realitas sosial yang diukur melalui penelitian sesuai dengan konstruk yang digunakan peneliti untuk memahaminya. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner sebagai instrumen penelitian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode korelasi product moment pearson yang kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel pada lampiran III. Apabila nilainya lebih besar dari r tabel, maka pernyataan tersebut dianggap sah. Tetapi jika nilai korelasi lebih kecil dari r tabel, maka pernyataan tersebut dianggap tidak sah dan harus dikeluarkan dari pengujian.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Butir Pertanyaan (X)	R _{hitung}	R _{tabel}	Butir Pertanyaan (Y)	R _{hitung}	R _{tabel}
1	0,606	0,396	1	0,618	0,396
2	0,711	0,396	2	0,611	0,396
3	0,814	0,396	3	0,828	0,396
4	0,853	0,396	4	0,536	0,396
5	0,532	0,396	5	0,864	0,396
6	0,768	0,396	6	0,773	0,396
7	0,708	0,396	7	0,314	0,396
8	0,898	0,396	8	1	0,396

Hasil uji validitas untuk dua puluh lima pernyataan responden sebagai sample dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pernyataan dinilai valid karena nilai R_{hitung} > nilai R_{tabel}, berdasarkan nilai r-tabel N23 (df = 25-2) dengan taraf signifikan sebesar 5% diperoleh nilai R_{tabel} sebesar 0,396.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat ukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban dari responden mengenai pertanyaan tersebut adalah konsisten (dapat dipercaya) atau stabil dengan menggunakan metode Alpha Cronbach's. Uji dilakukan pada taraf signifikansi α sebesar 0,05. Instrumen dapat dikatakan reliabel bila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari r tabel. Namun ada juga teori lain yang menyatakan jika nilai Cronbach's Alpha harus lebih besar dari 0,60 baru dapat dipastikan bahwa instrumen tersebut reliabel.

Hasil pengolahan data yang disajikan dalam tabel menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha (α) item untuk setiap variabel adalah lebih besar dari 0,60, sehingga item untuk setiap variabel adalah reliabel. Hasil uji reliabilitas ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Nilai Cronbach Alpha

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,794	0,780	16

Sumber: Olah data SPSS V.25

Uji Hipotesis (Uji t)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t, nilai thitung lebih kecil dibandingkan nilai ttabel dengan tingkat signifikansi 5% (0,05), yaitu nilai thitung $-0,164 < ttabel 2,069$. Dengan hasil itu maka H_0 ditolak yang berarti audit internal tidak berperan penting dalam penerapan transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Bogor.

Tabel 3. Uji t

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,858	0,707		9,706	0,000
	Audit Internal	-0,021	0,130	-0,034	-0,164	0,871

a. Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan DSP

Sumber: Olah data SPSS V.25

Akan tetapi berdasarkan pengolahan data dengan kriteria penilaian Dean J. Champion, kuesioner dengan karyawan BPBD Kota Bogor selaku responden, pengolahan dengan MS.Excel, SPSS, uji validitas, dan uji reliabilitas, maka H_0 diterima yaitu audit internal memiliki peran penting dalam mendorong penerapan transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kota Bogor. Peran Audit Internal pada BPBD Kota Bogor

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengumpulan data responden mengenai audit internal sebagai variabel X atau variabel independen, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan audit internal di BPBD Kota Bogor dinilai cukup baik. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan variabel X menggunakan MS.Excel yang didapatkan pada hasil mean atau rata-rata sebesar 58%. Mengacu pada skala kriteria ketiga dengan menggunakan rumus Dean J.Champion (1990), maka angka persentase sebesar 58% menunjukkan bahwa audit internal sudah dijalankan cukup baik di BPBD Kota Bogor.

Uji validitas menunjukkan seberapa baik realitas sosial yang diukur melalui penelitian sesuai dengan konstruk yang digunakan peneliti untuk memahaminya. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner sebagai instrumen penelitian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode korelasi product moment pearson yang kemudian dibandingkan dengan nilai r_{tabel} . Apabila nilainya lebih besar dari r_{tabel} , maka pernyataan tersebut dianggap sah. Tetapi jika nilai korelasi lebih kecil dari r_{tabel} , maka pernyataan tersebut dianggap tidak sah dan harus dikeluarkan dari pengujian. Hasil uji validitas pada variabel audit internal (X) untuk dua puluh lima pernyataan responden sebagai sample dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pernyataan dinilai valid karena nilai $R_{hitung} >$ nilai R_{tabel} , berdasarkan nilai r_{tabel} N23 ($df = 25-2$) dengan taraf signifikan sebesar 5% diperoleh nilai R_{tabel} sebesar 0,396.

Penerapan Transparansi pada BPBD Kota Bogor

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengumpulan data responden mengenai transparansi sebagai variabel Y atau variabel dependen, dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi di BPBD Kota Bogor dinilai sangat baik. Hal ini berdasarkan pada hasil perhitungan variabel Y menggunakan MS.Excel yang didapatkan hasil mean atau rata-rata sebesar 85%. Mengacu pada skala kriteria keempat dengan menggunakan rumus Dean J.Champion (1990), maka angka persentase sebesar 85% menunjukkan bahwa audit internal sudah dijalankan cukup baik di BPBD Kota Bogor.

Hasil uji validitas pada variabel audit internal (X) untuk dua puluh lima pernyataan responden sebagai sample dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pernyataan dinilai valid karena nilai $R_{hitung} >$ nilai R_{tabel} , berdasarkan nilai r_{tabel} N23 ($df = 25-2$) dengan taraf signifikan sebesar 5% diperoleh nilai R_{tabel} sebesar 0,396.

Peranan Audit Internal dalam Mendorong Penerapan Transparansi Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor

Saat awal pandemi kebutuhan masker meningkat dengan harga yang sangat mahal. Harga yang tercantum dalam RAB adalah harga terakhir pasaran Namun ternyata terjadi penurunan harga masker yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian harga dengan nominal yang tercantum dalam RAB. Maka dalam laporannya ada keterangan tambahan yang menjelaskan ketidakstabilan harga pasaran tersebut. Beberapa barang ada yang dikenakan pajak, namun untuk penanganan covid dibebaskan pajaknya dengan syarat harus ada keterangan bebas pajak dari dirjen pajak. Jika terdapat selisih lebih, maka dana tersebut akan dikembalikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selisih lebih tersebut lalu dilaporkan melalui laporan simphony ke Bank BNI, dan BPBD akan menerima resi sebagai bukti pengembalian. Laporan keuangan yang dibuat oleh BPBD sesuai dengan besar dana yang diterima yaitu 10M namun dengan menambahkan bukti keterangan pengembalian. BPBD Kota Bogor menerima dana hibah DSP tahun anggaran 2020 di tahun 2021 karena adanya kendala dalam pencairan.

Peranan Audit Internal dalam mendorong penerapan transparansi pengelolaan dana siap pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor dapat dilihat dari hasil wawancara dengan karyawan BPBD yang berlaku sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) penanganan COVID-19. Pengolahan data kuesioner, dengan karyawan BPBD Kota Bogor selaku responden. Nilai rata-rata untuk variabel Audit Internal sebesar 58% dan Variabel Transparansi sebesar 85%. Berdasarkan kriteria penilaian Dean J. Champion pada skala kriteria 50% - 75% dan 75-100%, maka dapat disimpulkan bahwa audit internal berperan cukup baik dalam mendorong penerapan transparansi pengelolaan dana siap pakai pada BPBD Kota Bogor, dan transparansi sudah diterapkan dengan sangat baik pada pengelolaan dana siap pakai (DSP). Dan berdasarkan pengolahan data dengan SPSS mengenai uji validitas dan uji reliabilitas, maka H_0 diterima yaitu audit internal memiliki peran penting dalam mendorong penerapan transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kota Bogor. Akan tetapi, berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t, diperoleh nilai thitung lebih kecil dibandingkan nilai ttabel dengan tingkat signifikansi 5% (0,05), yaitu nilai thitung $-0,164 < ttabel 2,069$ dan nilai signifikan $0,871 > 0,05$. Hasil thitung $-0,164$ yang berarti audit internal pengaruhnya negatif atau tidak berpengaruh dalam mendorong penerapan transparansi. Pada penelitian sebelumnya oleh Arif Setiawan Kasri (2017) dengan judul "Peran Audit Operasional Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Siap Pakai Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara", berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil variabel independensi signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,05), tetapi ada beberapa variabel yang memiliki signifikansi lebih besar dan berpengaruh terhadap variabel dependen, maka hipotesis yang dikemukakan peneliti dapat diterima. Dengan hasil itu maka H_0 dapat diterima yang berarti audit internal berperan penting dalam penerapan transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Bogor.

KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengenai peranan audit internal dalam mendorong penerapan transparansi pengelolaan dana siap pakai (DSP). Ditambah dengan teori-teori dasar yang dipelajari serta pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Audit Internal berperan sangat baik dalam mendorong penerapan transparansi pengelolaan dana siap pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, berdasarkan perhitungan atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kuesioner dengan menggunakan MS.excel maupun SPSS 25, secara keseluruhan terdapat 71% yang menjawab "Ya" atas pertanyaan-pertanyaan tentang Audit Internal dengan indikator Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (Standar Audit) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI), Transparansi dengan indikator mekanisme yang menjamin sistem

keterbukaan dan standarisasi dari semua pelayanan publik, mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik, mekanisme pelaporan dan penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan, dan prosedur penyaluran dan penggunaan dana siap pakai (DSP). Hal ini mengindikasikan bahwa audit internal berperan sangat baik dalam mendorong penerapan transparansi pengelolaan dana siap pakai pada BPBD Kota Bogor.

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t, yang menyatakan nilai thitung lebih kecil dibandingkan nilai ttabel dengan tingkat signifikansi 5% (0,05). Dengan hasil itu maka H_0 ditolak yang berarti audit internal tidak berperan penting dalam penerapan transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Bogor. Akan tetapi berdasarkan pengolahan data dengan SPSS pada uji validitas dan uji reliabilitas, hasil uji validitas untuk dua puluh lima pernyataan responden sebagai sample dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua pernyataan valid, berdasarkan nilai r-tabel N23 ($df = 25-2$) dengan taraf signifikan sebesar 5% diperoleh nilai r-tabel sebesar 0,413, sedangkan untuk taraf signifikan 1% diperoleh r-tabel 0,526. Dan hasil uji reliabilitas dengan Cronbach Alpha (α) item untuk setiap variabel yaitu 0,792 yang menunjukkan nilai lebih besar dari 0,60, sehingga item untuk setiap variabel adalah reliabel. Maka H_0 diterima yaitu audit internal memiliki peran penting dalam mendorong penerapan transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kota Bogor.

Saran

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, maka penulis ingin mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan atau masukan bagi instansi, yaitu sebagai berikut:

1. Informasi tentang pengelolaan bantuan bencana sebaiknya dipublikasikan dengan diperbaharui secara terus-menerus pada website resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor demi mengurangi opini publik yang buruk tentang pengelolaan bantuan bencana salah satunya tentang keterlambatan pembayaran alat kesehatan yang sumber dananya berasal dari dana hibah DSP.
2. Walaupun kegiatan audit internal yang telah dilakukan oleh inspektorat telah berjalan dengan baik, namun sebaiknya BPBD Kota Bogor mempersiapkan dengan lebih baik lagi kelengkapan dokumen sebagai bukti pendukung sebelum dilakukannya proses audit agar berjalan dengan lebih efektif dan efisien. BPBD Kota Bogor perlu juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana penanggulangan bencana berupa DSP yang berasal dari BNPB guna menghindari adanya penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. (2004). Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik: Edisi Ketiga. Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI).
- Alvin A. Arens, Randal J. Elder, M. S. B. (2015). Auditing dan Jasa Assurance, Edisi Kelimabelas Jilid I (Suryadi Saat (Ed.); 15th ed.). Penerbit Erlangga.
- Anggaran, P., Dan, P., & Desa, B. (2017). PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Eksekutif, 1(1).
- Arif Setiawan. (2017). Audit, Peran Dalam, Operasional Pengelolaan, Efektivitas Siap, Dana Pada, Pakai Penanggulangan, Badan Daerah, Bencana Utara, Kabupaten Buton Tenggara, Provinsi Sulawesi Akuntansi, Departemen Ekonomi, Fakultas Bisnis, D A N Hasanuddin, Universitas.
- Asian Disaster Preparedness Center. (2020). Disaster Risk reduction in Indonesia-Status Report 2020.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2008). Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2009). Data dan Informasi Bencana Indonesia.

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2015). Audit Sebagai Klarifikasi dan Validasi Pemanfaatan Dana Penanggulangan Bencana. Bnpb.Go.Id. <https://bnpb.go.id/berita/audit-sebagai-klarifikasi-dan-validasi-pemanfaatan-dana-penanggulangan-bencana>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2017). Potensi Ancaman Bencana. Bnpn.Go.Ig. <https://www.bnpb.go.id/potensi-ancaman-bencana>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2018). Mewujudkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana Secara Tertib, Transparan dan Akuntabel.
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. (n.d.). Sekilas SPIP. Bpkp.Go.Id. <http://www.bpkp.go.id/spip/konten/400/sekilas-spip.bpkp>
- BNPB. (2021). Badan Nasional Penanggulangan Bencana: Relawan Penanggulangan Bencana. <https://bnpb.go.id/berita/relawan-sebagai-ujung-tombak-penanggulangan-bencana>
- DISKOMINFO KOTA BOGOR. (2021). BNPB dan Pemkot Bogor Resmikan Rumah Sakit Lapangan Covid-19. Kotabogor.Co.Id. https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/100302
- Hardiyanto, A. T., & Megarachmawati, A. (2019). Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Atas Biaya Produksi Air Minum Dalam Kemasan 240ml Pada Pt. Aqua Golden Mississippi Tbk. Arief. Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi, vol.2(no.1), 46–65.
- Hirnima, Z. M. (2017). Studi Deskriptif Dampak Pengembangan Capacity Building Organisasi Pada Tingkat Responsivitas Tanggap Darurat Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo. April.
- Indonesia, I. (2009). Terminologi Pengurangan Risiko Bencana.
- Lawrence B.Sawyer, JD CIA, PA ; Mortimer A. Dittenhofer, Ph.D., CIA ; James H. Scheiner, P. . (2005). Sawyer's Internal Auditing 5th Edition The Practice of Modern Internal Auditing (5th editio). The Institute of Internal Auditors.
- Merisda Ayu Riansari. (2019). Pengaruh audit internal dan pengawasan terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana Desa Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka tahun 2017. Repository.Ubb.Ac.Id. <http://repository.ubb.ac.id/3465/>
- Nasional, B., & Bencana, P. (2008). Pedoman penggunaan dana siap pakai.
- Nazaruddin dan Syahrial. (2017). Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan, 3, 107, 109–111.
- Paramitha, G., & Nazarudin, L. dan I. (2000). Audit Internal Atas Persediaan Barang Dagangan. 1–8.
- Penanggulangan, B., Daerah, B., & Barat, P. K. (2020). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 2.
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
- Peraturan Daerah Bogor Nomor: 1 Tahun 2018, Perwali Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Pharamitha, L. R. (2016). EFEKTIVITAS PERAN AUDIT INTERNAL (Studi Kasus pada PT . Madubaru Yogyakarta). 81.
- POSKOTA. (2021). Walikota Bogor Dirikan Rumah Sakit Lapangan, Cegah Warga Isolasi di Rumah. Poskota.Co.Id. <https://poskota.co.id/2021/1/25/walikota-bogor-dirikan-rumah-sakit-lapangan-cegah-warga-isolasi-di-rumah>
- Purnama, D. B., & Widiastoeti, H. (2016). Audit Internal Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Alokasi

- Dana Desa (ADD) Untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Desa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(1), 77–94.
- Rosyidi, M. (2018). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *JOM FEB Riau University*, Pekanbaru, Indonesia, 1(1), 1–14.
- Schandl, A., & Foster, P. L. (2019). COSO Internal Control - Integrated Framework: An Implementation Guide for the Healthcare Industry. COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, January, 5. <https://www.coso.org/Documents/COSO-CROWE-COSO-Internal-Control-Integrated-Framework.pdf>
- Situmeang, E., Dwiatmanto, D., & Sulasmiyati, S. (2016). PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS (Studi pada PT Pindad (Persero) Turen-Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 33(1), 180–186.
- Sugiyono. (2015). METODE PENELITIAN PENDIDIKAN (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung. ALFABETA
- Tenry Fauziah Mahyuddin. (2013). Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Tugiman, Hiro. (2006). *Pandangan Baru Internal Auditing*. Yogyakarta. Kanisius